

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang menjadi pedoman bagi pemerintah untuk mengelola keuangan daerah maka harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk mewujudkan suatu transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Suatu laporan keuangan pemerintah harus dinyatakan dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang diterima secara umum. Sehingga dalam penyusunannya sangat diperlukan sistem akuntansi yang baik, dan dapat mendukungnya laporan keuangan yang berkualitas yaitu relevan, andal dan dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara. Bendahara tersebut wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada Badan

Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Kota Padang terdapat dua Bendahara yang mengelola anggaran dari pemerintah yaitu Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Bendahara Penerimaan bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD sedangkan Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Pada Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya menjadi pedoman bagi Bendahara dalam melaksanakan tugas kebhendaharaannya.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membutuhkan dana yang kas dengan jumlah kecil maupun besar. Kas merupakan salah satu aset yang paling penting dalam suatu instansi pemerintahan karena hampir semua kegiatan transaksi kas berasal dari penerimaan dan pengeluaran kas. Kas sifatnya liquid sehingga mudah untuk disalahgunakan dan menjadi sasaran untuk membuat kecurangan maupun diselewengkan. Oleh karenanya pentingnya ada suatu sistem dan prosedur yang memadai untuk melindunginya kas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sistem kas yang baik menghasilkan informasi yang bagi instansi pemerintah terhadap rencana-rencana yang telah ditetapkan, dengan demikian rencana dapat berjalan secara efektif, efisien dan terarah. Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang baik merupakan suatu alat untuk mengkoordinasi aktivitas-aktivitas agar dapat berjalan secara optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan prosedur yang baik salah satu cara yang dapat ditempuh adalah penyusunan sistem penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai instansi yang menangani keuangan dan aset daerah dalam proses Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), penatausahaan penerimaan daerah dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan anggaran. Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang menyajikan informasi akuntansi tentang pengendalian

penerimaan dan pengeluaran kas. Untuk terjaminnya penerimaan dan pengeluaran kas dibutuhkan Sistem Pengendalian Intern yang efektif terhadap struktur organisasi yang didalamnya terdapat pembagian tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan, seperti adanya pemisahan fungsi operasional, fungsi penyimpanan dan fungsi pencatatan. Sistem pengendalian intern ini berperan penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang efektif serta efisien agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam laporan keuangan yang akuntabel.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai tentang **“Prosedur Penerimaan Kas oleh Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Kas oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur penerimaan kas oleh bendahara penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.
2. Bagaimana Prosedur pengeluaran kas oleh bendahara pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

1.3 Tujuan Magang

Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penerimaan kas oleh bendahara penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.
2. Untuk mengetahui prosedur pengeluaran kas oleh bendahara pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

1.4 Manfaat Magang

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak, manfaat anatara lain sebagai berikut:

Bagi Penulis

1. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Prosedur penerimaan kas oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran kas oleh bendahara pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Padang.
2. Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja yang sesungguhnya.
3. Dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan ke lapangan sesuai dengan jurusan Keuangan Negara.
4. Membentuk kepribadian yang bertanggungjawab dan tangguh serta disiplin yang dibutuhkan saat memasuki dunia kerja.
5. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Keuangan Negara dan Daerah Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Bagi Universitas

1. Mahasiswa dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar kampus dapat melahirkan mahasiswa yang mampu bersaing dalam dunia kerja nantinya.
2. Menciptakan SDM dengan keahlian profesional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.
3. Menjalin kerja sama serta hubungan baik antar kependidikan dengan organisasi/instansi.
4. Untuk menciptakan mahasiswa yang kreatif, cekatan, rasa tanggungjawab terhadap tugas dan pekerjaan yang diberikan.

Bagi Instansi

1. Menjadi bahan masukan sebagai dasar pemikiran bagi instansi pemerinah untuk lebih mengoptimalkan kinerja sesuai dengan teori yang telah dipelajari oleh penulis di bangku kuliah.
2. Terwujudnya kerja sama yang baik antara instansi pendidikan dengan instansi tempat magang yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Sebagai mata kuliah yang harus diikuti oleh penulis, maka penulis melaksanakan magang yang sesuai dengan judul tugas akhir yang diajukan oleh penulis yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang. Kegiatan magang dilaksanakan selama 40 hari kerja (6 Januari s/d 28 Februari 2020) yang telah menjadi ketetapan dari pihak akademik.

1.6 Metodologi Penulisan

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa metode yang dijadikan sarana mencari informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Penulis melakukan penelitian melalui observasi atau pengamatan secara langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, sehingga dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

2. Studi Pustaka

Metode pengumpulan dengan memperoleh informasi berupa data-data yang diperoleh dari buku, literature, dan tugas akhir yang berhubungan dengan topik pembahasan laporan tugas akhir, hal ini sangat diperlukan sebagai referensi.

3. Pencarian Data melalui Internet

Pencarian data menggunakan internet dilakukan dengan mengutip dari media internet sebagai tambahan referensi untuk mendapatkan landasan teori dan informasi pendukung dalam pembahasan masalah, dengan mengunjungi *website* dapat memberikan masukan bagi penulis untuk melengkapi data yang diperlukan untuk tugas akhir.

1.6.2 Metode Analisis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber utama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian. Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah kota Padang dengan narasumber lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan penelitian di berbagai perpustakaan guna mencari sumber informasi yang berkaitan dengan judul tugas akhir, selain itu penulis juga mencari data melalui internet.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan magang mengenai Prosedur penerimaan kas oleh Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran kas oleh Bendahara pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang yang terdiri dari lima bab yang sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan secara ringkas latar belakang, perumusan masalah, tujuan kegiatan magang, manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu magang, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisikan landasan teori membahas pengertian Prosedur, Pengertian Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Kas, Pengertian Sistem Pengendalian Intern.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) kota Padang yang meliputi gambaran umum, sejarah dan perkembangan, landasan hukum, visi dan misi, tujuan dan sasaran struktur organisasi, tugas dan fungsi BPKAD kota Padang.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan mengenai prosedur penerimaan kas oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran kas oleh bendahara pengeluaran pada BPKAD Kota Padang, dan hasil analisis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan laporan yang dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dimasa yang akan datang.